

Dari Jakarta ke Penajam: Membangun Kota, Mengonstruksi Makna dan Budaya

Wahyuddin^{1*}

¹Program Studi Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: wahyuddin@unhas.ac.id*

*Korespondensi

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke daerah Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur. Membaca sejarah pemindahan ibu kota dan politik tata ruang ibu kota baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan terlihat bahwa aspek simbolik dalam ruang berperan penting untuk merepresentasikan budaya sekaligus mengonstruksi budaya yang dikehendaki pemerintah. Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui situs resmi pemerintah terlihat bahwa pemindahan dan tata ruang IKN di pulau Kalimantan saat ini pada dasarnya juga merupakan sebuah politik kebudayaan pemerintah yakni upaya untuk mewujudkan sebuah ibu kota negara yang mencerminkan sebuah identitas nasional yang melampaui segenap sekat identitas etnis dan identitas primordial lainnya.

Kata Kunci: etnisitas; IKN; Kalimantan; Penajam; politik kebudayaan

Abstract

This article discusses plans to move Indonesia's capital city to the Penajam area, North Paser, East Kalimantan. Reading the history of the relocation of the capital city and the politics of capital city spatial planning both during the colonial and post-independence periods, it is clear that symbolic aspects in space play an important role in representing culture as well as constructing the culture desired by the government. Based on data obtained through the official government website, it appears that the current transfer and spatial planning of IKN on the island of Kalimantan is also basically a cultural policy of the government, namely an effort to create a national capital that reflects a national identity that transcends all barriers of ethnic identity and another primordial identity.

Keywords: cultural politics; ethnicity; IKN; Kalimantan; Penajam



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Salah satu peristiwa penting dalam kurun waktu 25 tahun pasca reformasi adalah pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Penajam, Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satu alasan pokok yang mendorong kebijakan tersebut adalah krisis lingkungan yang terus menerus dihadapi oleh Jakarta. Banjir, macet dan kepadatan populasi menjadi kombinasi yang menyulitkan pemerintah di setiap periode untuk sungguh-sungguh dapat menyelesaikan masalah mendasar tersebut. Sebaliknya wilayah Penajam dan Kutai dianggap minim resiko bencana dan memiliki kawasan yang luas untuk dikembangkan sekaligus secara geografis berada di pusat Indonesia. Kesadaran soal

kerentanan Jakarta baik dari sisi ekologi maupun demografi pada dasarnya sudah lama disadari. Pada tahun 1975, presiden Sukarno telah pernah mewacanakan relokasi ibu kota ke Palangkaraya. Demikian pula di masa Orde Baru, presiden Suharto telah merencanakan kawasan Jonggol di arah sebelah selatan kota sebagai pusat pemerintahan baru. Di belahan dunia yang lain pun, fenomena relokasi ibu kota bukan sebuah hal asing.

Relokasi ibu kota atau pusat pemerintahan bukan sebuah hal yang baru dalam sejarah. Indonesia sendiri telah mengalami hal tersebut ketika keamanan Jakarta terancam pasca kedatangan sekutu yang membonceng NICA pada bulan April 1946. Yogyakarta dipilih untuk menjadi ibu kota baru. Lalu setelah Yogyakarta dikuasai oleh Belanda yang disusul oleh penangkapan Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, ibu kota negara dipindahkan ke Bukittinggi, Sumatra Barat di bulan Desember 1948.

Bahkan jika ditarik waktunya jauh ke belakang, di Nusantara, praktik pemindahan pusat kota dan pemerintahan telah terjadi baik di masa kolonial maupun di era kerajaan-kerajaan. Sanitasi yang buruk yang menyebabkan berjangkitnya wabah penyakit menjadi alasan utama dipindahkannya pusat kota kolonial dari kota tua Batavia. Herman Willem Daendels yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal memutuskan untuk memindahkan pusat kota, termasuk di dalamnya pusat pemerintahan dan pusat militer sekitar 4 km arah tenggara kota lama, di sebuah wilayah yang cukup lowong di Weltevreden. Sementara itu, kerajaan-kerajaan nusantara juga tak alfa dalam hal tersebut. Kerajaan Mataram pernah berganti-ganti pusat istana dari Kotagede, Kerto, Plered, Karta sura dan Surakarta (Ricklefs, 2008). Demikian pula, Di Sulawesi, pada awal abad ke XVI, ibukota kerajaan Gowa di Tamalate, sebuah daerah pedalaman dipindahkan ke wilayah dekat muara sungai Jeneberang yang menandai kesiapan kerajaan untuk terlibat dalam jaringan perdagangan maritim global (Mattulada, 2011: 7-9; Makkelo, 2019).



Gambar 1. Peta Relokasi Pusat Kota Kolonial dari Batavia ke Weltevreden
Sumber: Abidin Kusno, 2014

Tentu saja pemindahan ibukota melibatkan analisa segala aspek. Ekonomi, geografi, keamanan merupakan isu-isu yang menonjol dalam pembahasan. Namun bukan hanya terbatas pada aspek itu saja, pemindahan ibukota juga melibatkan aspek kebudayaan secara luas. Tata dan pola ruang kota beserta segala aspek simboliknya selain merepresentasikan budaya tertentu juga mengkonstruksi kebudayaan. Arsitektur, patung, monumen, jargon-jargon dan tanda material lainnya merupakan situs kebudayaan. Bagaimana hal-hal tersebut ditampilkan dan ditata dalam sebuah ruang kota menunjukkan sebuah orientasi ideologis tertentu yang dapat kita sebut sebagai politik kebudayaan. Melalui hal tersebut sebuah nilai ditanamkan secara sosial yang akan membentuk kesadaran, juga ketidaksadaran sebagai kerangka dalam menginternalisasi kehidupan politik dan kebudayaan.

Tulisan ini akan mendiskusikan politik kebudayaan melalui pemindahan ibu kota ke Penajam melalui elemen-elemen simbolik yang ditampilkan. Politik kebudayaan melalui tata ruang bukan sebuah hal yang baru. Sepanjang sejarah ibu kota baik itu di masa kolonial atau pun pasca kemerdekaan tata ruang ibu kota Jakarta dipenuhi dengan simbol-simbol yang diambil dan terinspirasi oleh kebudayaan. Simbol-simbol tersebut menjadi identitas ruang sekaligus dilihat sebagai upaya untuk mengonstruksi kesadaran warga soal identitas tersebut. Dalam sejarah penataan ruang ibu kota kita dapat secara jelas melihat bagaimana relasi hal tersebut dan upaya negara dalam hal ini penguasa untuk menyebarkan satu nilai atau budaya tertentu sekaligus mengonstruksinya.

Tata Ruang dan Politik Kebudayaan di Era Kolonial

Di masa awal pembentukan ibu kota kolonial VOC, pusat kota yang berukuran tak lebih dari 2.250 m panjangnya dan 1.500 m lebarnya dibangun dengan logika segregasi. Ruang kota Batavia yang dibangun pada awal abad ke XVII ditata dengan prinsip pemisahan pemukiman orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Pusat kota di mana terletak kantor-kantor kolonial dan perumahan orang-orang Belanda terletak di dalam sebuah kawasan yang dikelilingi benteng atau disebut kawasan intramuros. Sebaliknya diluar kawasan tertutup tersebut, terdapat pemukiman warga yang disebut kawasan extramuros. Untuk masuk ke dalam kawasan pusat, orang lokal tanpa memandang asal-usul mereka harus memiliki surat jalan atau pas jalan (Lohanda, 1996).

Pemisahan ruang ini dapat difahami terutama demi alasan keamanan. Pemilihan kota Batavia yang baru didirikan tersebut terletak di antara dua kerajaan lokal yang sewaktu-waktu dapat menjadi sumber masalah. Kerajaan Banten di sebelah barat dan Mataram di sebelah kiri, demikian pula tak jauh dari lokasi tersebut terdapat tangsi dagang pedagang Inggris yang juga menjadi saingan dalam perdagangan di Nusantara yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman. Karena itulah, model tata pemukiman tersebut melahirkan segregasi baik itu berdasarkan etnisitas maupun kelas sosial. Suku-suku nusantara yang pada umumnya berasal dari kelas sosial rendah hidup di luar benteng, sedangkan orang Eropa yang kaya hidup di dalam benteng. Model tersebut secara logis dari sudut pandang VOC karena pada masa-masa awal pembentukan kota, jumlah personil kolonial hanya sekitar 400 orang, 250 diantaranya sebagai militer kongsi dagang VOC dan 65 orang bertugas sebagai pekerja (Raben, 1996).

Meskipun demikian karena adanya kebutuhan akan pekerja, orang-orang pribumi dapat mengakses pusat kota setelah mendapatkan surat izin masuk. Demikian pula orang-orang Cina yang banyak melakukan aktifitas perdagangan bahkan memiliki hak-hak lebih istimewa dibanding orang pribumi untuk masuk ke pusat kota.



Gambar 2. Peta Kampung Berbasis Etnis pada Abad ke XVII dan XVIII di Batavia
Sumber: Castle, 1967

Keterangan: Kota Kolonial

AM = Ambon	BD = Banda	BG = Bugis	MK = Makassar
BM = Bima	BL = Bali	BT = Buton	SB = Sumbawa
DJ = Jawa-Sunda	FL = Flores	MD = Mandar	CH = China
MO = Moro	MR = Mardijker		

Dari peta di atas terlihat kota kolonial dalam benteng dikelilingi oleh kampung-kampung etnis yang dikepalai oleh masing-masing kepala kampung yang berasal dari etnis yang sama. Hingga tahun 1773, Gubernur Jenderal VOC telah mengangkat 16 kepala kampung yang terdiri atas dua orang Jawa, lima orang Bali, tiga orang Bugis, satu orang Makassar, satu orang Melayu, satu orang Mandar, satu orang Buton dan satu orang Cina (Raben, 1996), sebuah fakta yang menunjukkan pola administrasi wilayah kolonial yang bersifat tidak langsung. Artinya pemerintah kolonial Belanda mengontrol pemukiman melalui tangan-tangan orang-orang lokal sendiri.

Pada awal-awal pembangunannya, kota Batavia diidam-idamkan sebagai kota yang memiliki kemiripan karakter dengan kota-kota di Belanda sehingga kanal-kanal dibangun selain dimaksudkan untuk mengontrol banjir untuk juga membuka lalu lintas perairan. Karena keindahannya, sepanjang abad ke XVII, kota Batavia digelari "Ratu dari Timur". Meskipun demikian posisi Batavia yang secara geografis sangat rendah, menjadi hilir dari 13 sungai yang hulunya berada di dataran agak tinggi di sebelah selatan kota maka persoalan banjir menjadi peristiwa yang sering terjadi dalam sejarah kota Jakarta. Sedimen lahar yang mengalir di daerah sungai

serta sedimen yang berasal dari laut menjadi sumber banjir ketika curah hujan tinggi di musim penghujan (van Bemmelen, 1949; Sevin, 2013). Rekayasa lalu lintas air melalui pembangunan kanal-kanal di Batavia tak mampu efektif layaknya di negeri Belanda. Selain itu kebersihan sekitar kota yang tidak mampu dijaga menjadi sumber berkembangnya penyakit sehingga wabah merebak. Pekuburan Cina yang berada tak jauh dari kota yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar juga dianggap oleh orang Eropa sebagai salah satu sumber penyakit (Cobban, 1985). Akumulasi persoalan tersebut mendorong pemindahan pusat kota Kolonial ke beberapa kilometer arah selatan kota lama.

Situasi di abad ke XIX yang semakin kondusif membuat orang-orang Eropa memiliki keberanian untuk tinggal di luar Benteng. Mereka membangun rumah dengan arsitektur kolonial di luar kawasan intramuros dengan keuntungan wilayah yang masih luas dan lingkungan tidak padat. Hal ini pulalah kemudian yang juga menjadi salah satu faktor pendorong pemindahan ibu kota kolonial ke Weltevreden. Pada periode Gubernur Jenderal Willem Daendels (1808-1811) benteng-benteng kota lama dihancurkan sehingga mengubah morfologi dan struktur kota. Segregasi etnis mulai semakin lebur. Meskipun demikian, politik pajak tanah yang membebani pribumi yang tinggal di sekitar wilayah ibu kota baru tersebut lambat laun membuat mereka harus menjual tanah-tanah mereka untuk selanjutnya tinggal menjauh dari ibu kota. Hal ini memperlihatkan sebuah proses pembentukan identitas warga kota yang tidak lagi tersegregasi secara ketat berdasarkan etnisitas seperti di masa awal pembentukan kota Batavia. Bahkan sejak pertengahan abad ke XIX, karakter budaya penduduk Batavia mulai semakin melebur dan seiring dengan pernikahan lintas etnis, muncullah kategori suku Betawi yang merupakan hasil percampuran beragam etnis di Jakarta (Castle, 1967). Seiring perubahan ruang dan semakin kaburnya batas-batas etnis, identitas warga bertransformasi berdasarkan kapasitas ekonomi sehingga segregasinya berbasis kelas sosial. Luruhnya segregasi etnis dan menguatnya segregasi kelas di periode tersebut seperti menjadi akar dari struktur masyarakat Jakarta pada periode pasca kemerdekaan.

Arsitektur Ibukota dan Modernisasi di Era Orde Lama dan Orde Baru

Pemerintahan Orde lama yang mewarisi tata ruang kolonial berupaya memberi warna baru terhadap warisan tersebut. Tentu saja dengan spirit ingin melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Proyek nasionalis dalam tata ruang pun dijalankan dengan prinsip dekolonisasi. Semangat seorang nasionalis presiden Sukarno dalam menata Jakarta sebagai ibu kota terlihat jelas dalam pidatonya:

Build up Djakarta as beautifully as possible, build it as spectacularly as possible, so that this city, which has become the center of the struggle of the Indonesian people, will be an inspiration and beacon to the whole of struggling mankind and to all the emerging forces. If Egypt was able to construct Cairo as its capital, Italy its Rome, France its Paris and Brazil its Brasilia, then Indonesia must also proudly present Djakarta as the portal of the country. (Sukarno, 1962)

Pidato tersebut menunjukkan impian sang Presiden untuk menyejajarkan kota Jakarta selayaknya kota-kota besar dunia; Kairo, Roma, Paris dan Brazil. Untuk memulai impian tersebut, wilayah Weltevreden yang menjadi pusat kota kolonial tetap dijadikan salah satu pusat kota namun dengan mengembangkan wilayahnya

ke arah selatan. Pembangunan di masa awal kemerdekaan ditandai oleh krisis. Kita ketahui terjadi krisis politik di masa Sukarno dengan kegagalan eksperimen demokrasi yang mendorong munculnya demokrasi terpimpin. Demikian pula korupsi merebak di seluruh penjuru wilayah, juga krisis ekonomi yang membuat rasa frustrasi terhadap Revolusi yang didengungkan oleh Sukarno (Ricklefs, 1993, p. 237). Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan tekad presiden Sukarno untuk membangun proyek-proyek megah di Jakarta sebagai upaya simbolik menyejajarkan Indonesia dengan kekuatan negara-negara besar saat itu.

Di tengah krisis, Sukarno memerintahkan pembangunan Monumen Nasional (Monas) sebagai salah satu ikon penting bagi Jakarta secara khusus dan bagi Indonesia secara umum yang diharapkan dapat memberikan kebanggaan dan identitas sebagai negara merdeka. Pembangunan Monas ini tak lepas dari imajinasi modernis Sukarno dengan mengambil inspirasi dari keberadaan menara Eiffel di Paris (Abeyasekere, 1987). Tak berselang lama setelah itu, untuk menyiapkan pelaksanaan Asian Games ke-4 dan pesta olahraga Ganefo pertama, presiden Sukarno memerintahkan pembangunan stadion olah raga modern yang kini menjadi Stadion Gelora Bung Karno, demikian pula konstruksi hotel mewah, Hotel Indonesia dan pembangunan pusat perbelanjaan Sarinah. Proyek mercu suar tersebut menunjukkan orientasi penataan ibukota yang menjadi simbol dari visi presiden Sukarno tentang Indonesia yang besar yang sejajar dengan negara-negara yang pernah menjadi kekuatan kolonial. Upaya presiden Sukarno tersebut tidak sia-sia. Selama periode tahun 1960 an, Jakarta telah menjadi ibu kota yang mendunia, selain sebagai pusat sirkulasi ekonomi (Cobban, 1985). Meskipun demikian reputasi Jakarta sejak era kolonial yang merupakan kota di mana menjamur pemukiman-pemukiman informal warga yang mencerminkan budaya komunal dengan bentuk yang kurang terstruktur dan terkesan kumuh terus berlanjut.

Pembangunan Monumen Nasional yang kemudian menjadi jantung kota baru bagi Jakarta secara simbolik menggeser pusat kota kolonial yang dahulunya berada tak jauh dari lokasi tersebut. Monumen sebagai pusat tersebut dikelilingi dengan pembangunan gedung-gedung baru mengelilingi sebuah lapangan yang dinamakan Lapangan Merdeka. Sebuah penataan yang simbolik menunjukkan upaya menjauh dari citra kota kolonial. Dari bentuk arsitektural terlihat bahwa monumen tersebut terinspirasi dari nilai kebudayaan Jawa Kuno yakni bentuk Lingga dan Yoni. Perpaduan Lingga yang merupakan simbol kejantanan seorang pria dan Yoni simbol kesuburan perempuan memperlihatkan kehadiran tradisi dalam upaya memodernisasi kota. Sukarno dalam menata kota berupaya untuk melakukan sinkretisasi secara simbolik. Terjadi sebuah perpaduan antara nilai dan kejayaan masa lalu yang dihadirkan dan dimaknai ulang sebagai simbol modernitas. Hal tersebut tampak sebagai upaya untuk terus menghubungkan narasi masa lalu nusantara dan Indonesia baru (Anderson, 1990). Dalam hal ini, bentuk Monas tersebut tak bisa dilepaskan dari pengaruh kuat budaya Jawa yang baik secara sadar maupun tanpa sadar menjadi representasi Indonesia melalui arsitektur ibu kota.

Proyek urbanisme Sukarno memperlihatkan pembacaan soal konsep modernitas dengan cara yang baru. Upaya membentuk sebuah identitas nasional dalam konteks sebuah negara yang baru terlepas dari kuasa kolonial tidak menegasikan tradisi. Nilai-nilai tradisional dan inspirasi dari negara-negara barat coba di padukan untuk diberi pemaknaan ulang. Konsep yang datang baik dari

“barat” maupun “timur” bukan menjadi soal yang penting bagi Sukarno sebab kesemuanya bermuara pada satu yakni meletakkan Jakarta dalam peta kota dunia yang sejajar dengan kota-kota dunia lainnya (Kusno, 2014).

Di satu sisi, bangunan megah dan monumen yang dapat kita asalkan merupakan bentuk peradaban yang tumbuh di dunia barat dimanfaatkan oleh Sukarno untuk menampilkan satu ciri modernisasi kota. Namun di sisi lain, warisan dari tradisi, terutama tradisi dan nilai-nilai budaya Jawa turut memperkaya konsep modernitas yang diusung dalam menata morfologi kota Jakarta. Reinterpretasi makna modernitas ini tak lain dimaksudkan agar bangsa Indonesia memiliki rasa bangga terhadap negaranya setelah dalam periode panjang berada dalam kuasa kolonial. Dalam konteks negara merdeka yang dihuni oleh ratusan kelompok etnis berbeda, penataan kota dengan gaya arsitektur modern merupakan upaya Sukarno untuk memperkuat kesatuan nasional dan mengkonstruksi identitas nasional (Leclerc 1993; Macdonald, 1995). Dalam hal itu tak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan Jawa menjadi latar apa yang disebut kebudayaan nasional.

Upaya Sukarno untuk menjadikan Indonesia setara dengan kota-kota dunia lainnya harus berakhir dengan tragis pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Terbunuhnya jenderal-jenderal angkatan darat menjadi momen munculnya rejim Orde Baru yang secara politis dan sistematis meminggirkan narasi sejarah dan ideologi yang dulu dibangun presiden Sukarno. Jika Sukarno di awal masa kepemimpinannya berupaya untuk menjauh dari bayang-bayang penguasa kolonial yang bisa terlacak salah satunya dari politik tata ruang ibu kota, maka Suharto pun nampak melakukan hal yang sama yakni berupaya menjauh dari nama besar Sukarno. Bukan hanya sekadar menjauh tapi juga memberikan stigma-stigma buruk. Meskipun demikian, dalam hal politik simbolik ruang, pola yang dilakukan pada dasarnya tidak berbeda.

Seperti halnya Sukarno, langkah pertama yang dilakukan untuk menghapus citra kolonial di Jakarta adalah membangun Monumen Nasional, maka Suharto sesaat setelah berada di puncak kekuasaan, ia membangun monumen peringatan di lokasi ditemukannya jasad jenderal-jenderal Angkatan Darat. Monumen Lubang Buaya, terletak di selatan kota menjadi langkah simbolik yang menjadi simpul ingatan akan bahaya komunis yang secara langsung maupun tak langsung menempatkan Sukarno dalam posisi yang tertuduh sebagai pihak yang turut bersalah atas peristiwa tersebut. Di atas narasi inilah selama puluhan tahun kekuasaannya, narasi Orde Baru dibangun yang dijadikan alasan untuk mengaktifkan militer sebagai organ penting dalam mengawal pemerintahannya.

Di tengah booming ekonomi di awal pemerintah Suharto dengan profit dari sektor minyak dan gas, pemerintahan Suharto membangun Indonesia. Pemukiman-pemukiman informal di Jakarta yang kurang mendapat perhatian di zaman Orde Lama mendapat sentuhan lewat *Kampung Improvement Program* (KIP). Selain itu pengembang-pengembang besar yang merupakan kroni-kroni Suharto membangun perumahan-perumahan elit di kawasan Jakarta hingga menguasai wilayah pinggir kota. Sektor swasta yang merupakan orang-orang dekat Cendana membangun real estate. Meskipun demikian, pemerintah Orde Baru berupaya mewujudkan integrasi sosial melalui kebijakan perumahan. Setiap pembangunan kawasan rumah mewah diharuskan untuk membangun pula di tempat tersebut sembilan rumah tipe kecil dan sederhana. Namun program yang kelihatan ideal tersebut tak berjalan dengan

baik, bahkan program KIP pemerintah tetap tak bisa mengurai kekumuhan di kampung-kampung Jakarta. Padatnya penduduk membuat pemerintah selalu kesulitan dalam hal tersebut.

Di masa Orde Baru, penamaan gedung-gedung pemerintah diberi nama yang bernuansa Jawa yakni bersumber dari bahasa Sanskerta. Ruangan-ruangan seperti di gedung DPR/MPR diberi nama Grahata, Lokawirabasha, Pustakaloka, Grahakarana, Samania Sasanagraha. Salah satu ruang di istana kepresidenan tempat presiden Suharto bekerja diberi nama Bina Graha. Ruangan-ruangan tersebut banyak dihiasi perabot dan ukiran dari Jepara. Tanpa menyebut gedung-gedung kantor pemerintahan lainnya, simbolisasi penamaan di kedua gedung yang merupakan representasi republik ini menunjukkan pengaruh kuat budaya Jawa dalam penataan ruang di zaman orde baru. Nama-nama tersebut bahkan sulit diucapkan oleh orang dari luar kebudayaan Jawa (Said, 2013). Demikian pula di masa ini, rekonstruksi kampus Universitas Indonesia yang merupakan ikon dunia pendidikan Indonesia memperjelas kuatnya pengaruh kultur Jawa dalam arsitektur dan penataan ruang kampus tersebut. Atap gedung Rektorat dibuat mirip dengan denah rumah bangsawan Jawa. Dibuat secara bertingkat-tingkat secara spasial mengikuti struktur tubuh pada manusia. Bangunan kampus ini merepresentasikan arsitektur poskolonial yang secara nyata bersumber dari kearifan bangunan lokal nusantara. Hal ini pada dasarnya memperlihatkan model yang tak berbeda dengan Sukarno dimana tradisi dimaknai secara baru dalam konteks modern.

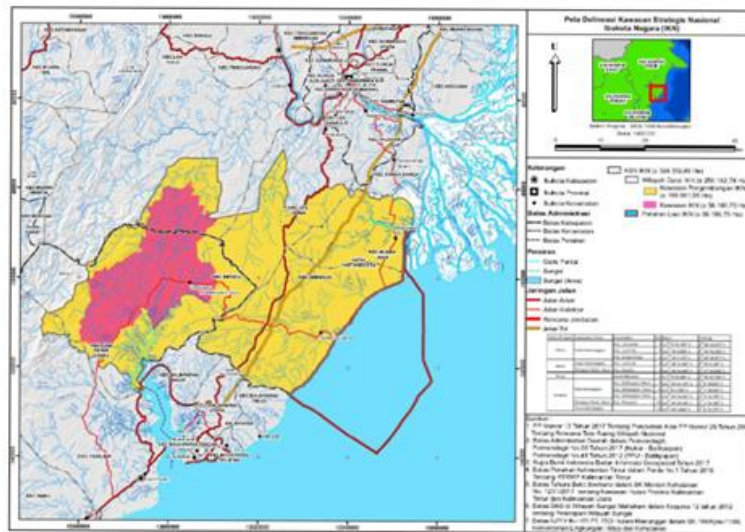
Meskipun kesan pengaruh budaya Jawa yang sangat kental dalam politik spasial di zaman Orde Baru, di sisi lain terdapat satu visi pembangunan kebudayaan nasional yang bersumber dari bukan hanya pada budaya lokal tertentu namun dari keseluruhan budaya nusantara. Hal tersebut tampak dari pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Sebuah display kebudayaan nusantara yang menekankan pada kekhasan masing-masing daerah. Rumah-rumah adat dari 27 Provinsi yang ada di zaman Orde Baru diberi ruang yang sama untuk dibangun dan menjadi etalase untuk menampilkan kekayaan daerah masing-masing. Ini adalah sebuah miniatur Indonesia yang ditampilkan secara egaliter dimana masing-masing kebudayaan tampil saling mengayakan satu sama lain dalam bingkai yang harmonis. Visi kebudayaan orde baru yang ditampilkan dalam sebuah ruang publik merepresentasikan semangat Ke-Indonesia-an yang meskipun harmoni tersebut sebahagiannya merupakan buah dari ketakutan terhadap kekuasaan yang ditopang oleh media dan militer. Kehadiran taman Mini ini secara politik kebudayaan merupakan sebuah upaya Orde Baru untuk mengamankan legitimasi budaya dan politik pemerintahannya (Pemberton, 1994). Di masa Orde Baru, kebudayaan lokal diberi ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan dan modernisasi Indonesia. Kebudayaan seperti yang tampak pada pembangunan Taman Mini menjadi representasi identitas Indonesia yang mendukung pengembangan pariwisata. Meskipun demikian, identitas kebudayaan akan direpresi manakala masuk dalam wilayah politik. Perencanaan kota yang dibarengi dengan kontrol media dan militer menghasilkan sebuah budaya ketundukan terhadap wacana pembangunan yang diproduksi pemerintah.

Ibu Kota Baru dan Babak Baru Politik Kebudayaan

Upaya penataan ibu kota yang dilakukan oleh rejim-rejim yang silih berganti hadir dianggap gagal untuk menjadikan Jakarta sebagai kota masa depan yang tetap ideal sebagai sebuah ibu kota negara. Karena itu, melalui UU no 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota negara (IKN), Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur ditunjuk sebagai Ibu Kota baru bagi Indonesia. Tentu pemilihan lokasi ini telah melalui beragam analisa kelayakan sehingga dianggap memenuhi syarat kelayakan dari segala aspek. Dari aspek geografi, posisi pulau Kalimantan yang berada di tengah-tengah Indonesia menjadi terasa sangat simbolik. Pembacaan secara simbolik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini menjadi relevan salah satunya karena gestur simbolik pemerintah sendiri. Pada saat pembukaan wilayah ibu kota baru ini, Presiden Joko Widodo meminta setiap gubernur untuk membawa tanah dan air dari wilayah mereka masing-masing untuk dimasukkan ke dalam sebuah kendi yang diberi nama "Kendi Nusantara". Penyatuan tanah dan air dari seluruh nusantara menjadi sebuah simbol menyatunya wilayah kesatuan negara di ibu kota baru. Gestur politik simbolik ini secara kebudayaan dapat dimaknai sebagai peleburan seluruh identitas etnis dan identitas kedaerahan lainnya untuk selanjutnya lebur ke dalam identitas nasional. Dalam hal ini, salah satu langkah yang cukup menarik adalah pilihan untuk menjauh dari pulau Jawa yang selama era kolonial maupun pasca kemerdekaan menjadi episentrum Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun sisi politik. Selama ini kita tahu bersama sepanjang kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, budaya Jawa baik secara simbolik maupun nilai-nilainya dalam beragam analisis menjiwai pengelolaan ruang di ibu kota. Mulai dari arsitektur, penamaan jalan, gedung hingga spirit yang digunakan dalam mengelola itu semua dianggap terinspirasi warisan Mataram. Hal yang membuat pada kurun waktu tertentu sentimen dan rasa ketidakadilan sering disuarakan oleh masyarakat dari wilayah di luar Jawa, sehingga dikotomi Jawa dan non Jawa muncul dalam wacana publik.

Memperhatikan komposisi etnis di wilayah ibu kota baru ini terlihat cukup heterogen. Dihuni oleh penduduk asli Suku Paser, Dayak, Banjar sebagai penduduk lokal pulau Kalimantan. Hidup pula dengan jumlah yang relatif besar orang Bugis dan orang Jawa. Heterogenitas ini menjadi penting sebagai sebuah modalitas budaya yang mampu hidup dalam sebuah keanekaragaman. Dapat dipastikan bahwa gelombang migrasi ke daerah ini akan meningkat sehingga corak budaya warga akan semakin bervariasi.

Meskipun demikian jika kita memperhatikan rencana tata ruang kota dimana pembagian area IKN ke dalam beberapa zona. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN dijelaskan bahwa wilayah IKN dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah inti IKN dan wilayah pengembangan. Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud meliputi kawasan Ibu Kota Nusantara dengan luas kurang lebih 56.180 hektare dan kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas 199.962 hektare (Bappenas, 2021), maka kita melihat bahwa pola spasial ini memiliki kemiripan dengan yang dilakukan oleh pemerintah VOC di awal abad ke XVII melalui *distingsi intramuros* dan *extramuros*.



Gambar 3. Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara
Sumber: <https://www.ikn.go.id/DelineasiIKN.pdf> (Diakses tgl 20/07/2023)

Wilayah yang berwarna pink dalam peta di atas merupakan wilayah inti yang dapat dianalogikan sebagai ruang dalam benteng kolonial di masa lampau. Bedanya adalah jika yang membatasi antar pusat dan pinggir di masa lampau adalah benteng, maka di IKN pemisah tersebut adalah hutan seperti yang terlihat dalam peta berikut.



Gambar 4. Imajinasi Kawasan Inti IKN
Sumber: <https://www.ikn.go.id/tentang-ikn> (Diakses 19/07/2023)

Tentu pihak yang akan menjadi penghuni kawasan inti pertama-tama adalah para pegawai pemerintah yang bekerja di kantor-kantor di dalam kawasan inti. Jika kita memperhatikan perencanaan pemerintah soal perumahan seperti yang terlihat dalam situs resmi IKN, terlihat model perumahan bersusun semacam apartemen akan menjadi pilihan.



Gambar 5. Model Perumahan di IKN

Sumber: <https://www.ikn.go.id/tentang-ikn> (Diakses 19/07/2023)

Model apartemen yang modern dengan kesan jauh dari arsitektur tradisional mengisyaratkan sebuah visi nasionalis yang modernis. Nasionalis dalam arti tidak berbasis pada satu nilai tradisional tertentu. Hal ini sejalan dengan jargon-jargon yang diproduksi oleh pemerintah soal IKN ini. Misalnya saja, visi global 2045 : a global city for all. Demikian pula jargon-jargon seperti locally integrated, globally connected, universally inspired dan IKN menjadi simbol identitas nasional yang akan menghadirkan sejarah baru dan peradaan baru memperlihatkan spirit Indonesia-sentris. Memperhatikan model istana negara yang akan dibangun, tak tampak ada jejak etnisitas tertentu di sana yang memberi warna melainkan logo kepala garuda dan sayap-sayapnya akan menjadi ikon istana negara. Logo nasional tersebut seperti diketahui dianggap telah meleburkan seluruh simbol-simbol lokal daerah.

Desain Istana Negara IKN

Dalam rilisnya, desain istana negara di IKN akan dibangun di atas lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.2002 dengan ikon garuda yang sedang merentang sayap-sayapnya (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2022). Simbol burung garuda tentu melambangkan semangat nasional yang melampaui sekat-sekat primordial seperti agama dan kesukuan. Istana kantor kepresidenan sendiri akan dinamai istana Garuda yang dibangun di lahan paling puncak.

Secara nyata, tak ada konsep budaya etnis tampak dalam wacana IKN. Selain produksi wacana soal identitas nasional, yang tampak jelas juga dari rancangan ibu kota inilah konsepnya yang ramah lingkungan. Perencanaan 75% kawasan merupakan kawasan hijau, ibu kota baru ini mengusung konsep smart city dengan mengedepankan penggunaan energi rendah karbon dan energi yang berkelanjutan.

Konsep penataan IKN ini dapat dikatakan merupakan sebuah rekonstruksi budaya. Produksi wacana dengan melibatkan jargon, gambar serta visi kota, hal-hal tersebut mengkondisikan kesadaran warga. Nilai-nilai tersebut ditanamkan secara bertahap sejak pertama kali diresmikan secara simbolik melalui ritual Kendi Nusantara dimana hal tersebut sebagai sebuah cara untuk mengonstruksi sebuah kebudayaan baru di ibu kota baru.

Jika kawasan pusat akan menjadi kawasan elit yang akan banyak dihuni oleh pegawai-pegawai pemerintahan dan barangkali aktor-aktor yang akan mendukung

secara langsung ekosistem kawasan tersebut, maka kawasan pinggir kota akan menjadi kawasan yang akan menjadi tempat menampung imigran dari berbagai wilayah di tanah air. Kawasan pinggir kota yang tidak di tata secara ketat seperti kawasan inti kan menjadi wilayah dimana identitas primordial kemungkinan masih akan tumbuh. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi pemerintah agar jangan sampai terjadi perkampungan-perkampungan yang berbasis identitas primordial seperti apa yang dahulu pernah terjadi di masa awal pembangunan Batavia. Masih luasnya lahan-lahan hutan yang memungkinkan dijadikan lahan pemukiman selain memungkinkan munculnya isu deforestasi seiring terjadinya urbanisasi (Rudel, 2005), juga tak tertutup kemungkinan kelompok-kelompok yang bermukim itu terbentuk atas kesamaan identitas tertentu. Namun sebaliknya bisa juga terjadi, jika migrasi yang tinggi terjadi di kawasan pinggir IKN, kita bisa juga membayangkan sebuah proses asimilasi kebudayaan seperti yang pernah terjadi di masa lalu ketika etnis Betawi terbentuk (Ocsanda, et al., 2023).

Kesimpulan

Belajar dari pemindahan dan penataan ibukota di masa lampau terlihat bahwa aspek kebudayaan turut berperan di dalamnya. Baik itu dalam arti terinspirasi dari satu kebudayaan tertentu dalam menata ruang kota maupun simbol-simbol yang digunakan, demikian pula penataan kota dimaksudkan untuk menciptakan sebuah budaya yang dikehendaki oleh pemerintah. Karena itulah dalam Sejarahnya ibukota selalu menjadi kota yang syarat akan simbol. Melalui simbol-simbol itulah, kebudayaan akan terepresentasi dan melalui simbol-simbol itu pula kesadaran masyarakat direkonstruksi. Dalam kerangka itulah pemindahan ibukota negara ke pulau Kalimantan beserta desain-desain kotanya, jargon-jargon yang mengiringinya yang dapat dilihat di situs resmi dibaca sebagai bukan hanya upaya untuk memiliki ibukota yang lebih aman dan nyaman dari aspek lingkungan, ekonomi dan yang lainnya, namun juga dilihat sebagai sebuah politik kebudayaan. Sebuah upaya untuk mengkonstruksi kesadaran masyarakat mengenai visi yang akan dilakukan di IKN tersebut. Sejauh yang dapat dilihat, pemerintah berupaya untuk menghadirkan wilayah IKN terutama bagian inti IKN terlepas dari segala identitas kebudayaan lokal yang berbasis etnis, namun berupaya untuk mempresentasikan spirit ke-Indonesiaan yang melampaui aspek kesukuan.

Referensi

- Abeyasekera, S. (1987). *Jakarta: A History*. Singapore: Oxford University Press.
- Anderson, B. R. (1990). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Andreastuti, S. D., Newhall, C., & Dwiyanto, J. (2006). Menelusuri kebenaran letusan gunung merapi 1006. *Indonesian Journal on Geoscience*, 1(4), 201-207. <https://doi.org/10.17014/ijog.1.4.201-207>.
- Bappenas (2021). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. Jakarta.
- Castles, L. (1967). The Ethnic Profile of Djakarta. *Indonesia*, 3, 153-204. <https://doi.org/10.2307/3350726>.

- Cobban, J. L. (1985). The Ephemeral Historic District in Jakarta. *Geographical Review*, 75(3), 300–318. <https://doi.org/10.2307/214487>.
- Kemendikbud/Baparekraf RI. (2022). Desain Istana Kepresidenan di IKN dan Ikoniknya Garuda. <https://kemendikbud.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/desain-istana-kepresidenan-di-ikn-dan-ikoniknya-garuda>.
- Kusno, A. (2014). *Behind the postcolonial: Architecture, urban space and political cultures in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315011370>.
- Leclerc, J. (1993). Mirrors and the Lighthouse: A Search for Meaning in the Monuments and Great Works of Sukarno's Jakarta, 1960–1966. *Urban Symbolism*, Leiden. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004609990_004.
- Lohanda, M. (1996). *Sejarah para pembesar mengatur Batavia*. Jakarta: Djambatan.
- Macdonald, G. M. (1995). Indonesia's Medan Merdeka: national identity and the built environment. *Antipode*, 27(3), 270–293. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.1995.tb00278.x>.
- Makkelo, I. D. (2020). Sejarah Makassar dan tradisi literasi. *Lembaran Sejarah*, 15(1), 30–48. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59523>.
- Mattulada. (2011). *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Nas, P. J. M. (1992). Jakarta, City Full of Symbols: An Essay in Symbolic Ecology. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 7(2), 175–207. <http://www.jstor.org/stable/41056849>.
- Ocsanda, D., Wijaya, C. I., Al Haq, M. A., Efendi, J. D., & Prihantoro, F. (2023). Oportunitas Pembentukan Entitas Kebudayaan Baru, Tinjauan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia 2024 terhadap Perpindahan Ibu Kota Voc 1619. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.291>.
- Pemberton, J. (1994). Recollections from “beautiful Indonesia” (somewhere beyond the postmodern). *Public culture*, 6(2), 241–262.
- Raben, R. (1996). Batavia and Colombo: The Ethnic and Spatial Order of Two Colonial Cities 1600 -1800. *Disertasi*. Universitas Groningen.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Depok: Serambi Ilmu Semesta.
- Rudel, T. (2005). *Tropical Forests: Regional Paths of Destruction and Regeneration in the Late Twentieth Century*. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/rude13194>.
- Said, S. (2013). *Dari Gestapu ke reformasi: serangkaian kesaksian*. Bandung: Mizan.
- Salsabila, A. H., & Nurwati, N. (2020). Deforestasi dan migrasi penduduk ke ibu kota baru kalimantan timur: peran sinergis pemerintah dan masyarakat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 27–39.

- Sukarno. (1962). *Transformation of Djakarta Raya, Indonesia*. Department of Foreign Affairs, Republic of Indonesia.
- van Bemmelen, R. W. (1949). General geology of Indonesia and adjacent archipelagoes: the East Indies, inclusive of the British part of Borneo, the Malay Peninsula, the Philippine Islands, Eastern New Guinea, Christmas Island, and the Andaman-and Nicobar Islands. (No Title).
- Wong, T. C., & Sevin, O. (2013). Faut-il abandonner Jakarta?. *Les Cahiers d'Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux*, 66(261), 3-28. <https://doi.org/10.4000/com.6760>.